



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD SYAIBANI
2. Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
3. NHK : 101935

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.520.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , WARISAN Rp. 220.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/135 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **158.000.000**

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. LAINNYA, SEPEDA UTK OLAH RAGA 3 UNIT RB DAN SELI (BROMPTON, DAHON , POLYGONE) Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
5. MOTOR, YAMAHA NMAX NMAX 150 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **131.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **29.578.500**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **85.337.955**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 2.924.416.455

III. HUTANG

Rp. 812.841.035

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.111.575.420

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.